

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

LAPORAN KEUANGAN

**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

AUDITED


**DEWAN PERTYINGANGAN PRESIDEN
(WARTIMPRES)**

**Jl. Veteran III No.2
Jakarta 10110**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

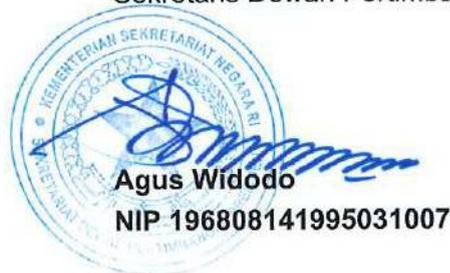
Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 *Audited* disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksud untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Jakarta 6 Mei 2024

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo
NIP 196808141995031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran	
A. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2023 <i>Audited</i>	
B. Laporan SAKTI Periode 14	



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

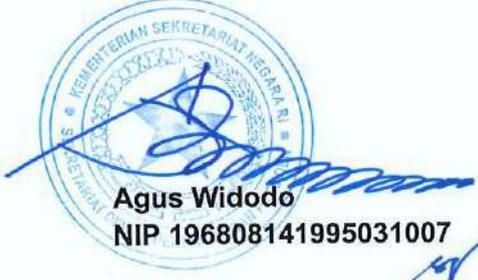
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2024

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,


Agus Widodo
NIP 196808141995031007

RINGKASAN

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.120.254,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp31.194.549.229,00 atau mencapai 97,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.148.490.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.102.558.705,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp699.238.272,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp3.036.663.501,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp366.656.932,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp347.955.615,00 dan Rp3.754.603.090,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.099.776,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp30.740.632.564,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp30.733.532.788,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp617.871,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp30.732.914.917,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.303.748.771,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp30.732.914.917,00, ditambah koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp340.261,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp31.183.428.975,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.754.603.090,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TA 2023				TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%	REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	11,120,254.00	11,120,254.00	0	77,889,990.00
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	11,120,254.00	11,120,254.00	0	77,889,990.00
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	3,184,548,000.00	3,109,746,134.00	(74,801,866.00)	97.65	3,412,220,307.00
Belanja Barang	B.4	27,286,195,000.00	26,409,077,700.00	(877,117,300.00)	96.79	27,355,529,669.00
Belanja Modal	B.5	1,677,747,000.00	1,675,725,395.00	(2,021,605.00)	99.88	1,172,624,184.00
JUMLAH BELANJA		32,148,490,000.00	31,194,549,229.00		97.03	31,940,374,160.00

NERACA**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	452.500,00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.2	5.087.226,00	4.239.233,00
Persediaan	C.1.3	694.151.046,00	898.887.293,00
Jumlah Aset Lancar		699.238.272,00	903.579.026,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	12.325.635.180,00	11.050.230.392,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	398.818.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(9.687.789.679,00)	(8.718.805.063,00)
Jumlah Aset Tetap		3.036.663.501,00	2.333.325.329,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	858.693.900,00	858.693.900,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	341.882.182,00	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(833.919.150,00)	(784.369.650,00)
Jumlah Aset Lainnya		366.656.932,00	74.324.250,00
JUMLAH ASET		4.102.558.705,00	3.311.228.605,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	347.955.615,00	7.027.334,00
Utang Muka dari KPPN	C.4.2	0	452.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.3	347.955.615,00	7.479.834,00
JUMLAH KEWAJIBAN		347.955.615,00	7.479.834,00
EQUITAS			
Ekuitas	C.II	3.754.603.090,00	3.303.748.771,00
Jumlah Ekuitas		3.754.603.090,00	3.303.748.771,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS		4.102.558.705,00	3.311.228.605,00

LAPORAN OPERASIONAL

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.1	7.099.776,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		7.099.776,00	0
BEBAN			
Beban Pegawai	0.2	3.109.746.134,00	3.412.220.307,00
Beban Persediaan	0.3	1.259.649.038,00	1.386.894.793,00
Beban Barang dan Jasa	0.4	18.939.870.005,00	19.667.099.821,00
Beban Pemeliharaan	0.5	2.450.219.560,00	3.529.715.086,00
Beban Perjalanan Dinas	0.6	3.962.273.450,00	2.649.188.796,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.7	1.018.874.377,00	756.344.061,00
JUMLAH BEBAN		30.740.632.564,00	31.401.462.894,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30.733.532.788,00)	(31.401.462.894,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	77.605.640,00
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	284.350,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		617.871,00	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		617.871,00	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.8	617.871,00	77.605.640,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30.732.914.917,00)	(31.323.857.224,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	0.9	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LD		(30.732.914.917,00)	(31.323.857.224,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	3.303.748.771,00	2.765.121.825,00
SURPLUS/DEKURIT L0	E.2	(30.732.914.917,00)	(31.323.857.224,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	340.261,00	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.1	340.261,00	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH ATAU MENGURANGI			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	31.183.428.975,00	31.862.484.170,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		450.854.319,00	538.626.946,00
EKUITAS AKHIR	E.5	3.754.603.090,00	3.303.748.771,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran III No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah "Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang membantu SAI dalam menyusun laporan keuangan. Pada Aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara akrual.

Modul-modul dalam SAKTI terdiri dari Modul Penganggaran (Komitmen, Bendahara dan Pembayaran) dan Modul Pelaporan (Aset Tetap, Persediaan dan *General Ledger* dan Pelaporan). Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Dana yang dibatasi penggunaannya, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman keputusan Menteri Keuangan nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan serta realokasi anggaran yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Uraian	TA 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	3.910.621.000,00	3.184.548.000,00
Belanja Barang	31.178.903.000,00	27.286.195.000,00
Belanja Modal	284.000.000,00	1.677.747.000,00
Jumlah Belanja	35.373.524.000,00	32.148.490.000,00

Relokasi Anggaran selama tahun 2023 sebesar Rp3.225.034.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, menginstruksikan anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) agar direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp363.928.000,00**.
- b. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan Revisi administrasi dalam rangka pergeseran anggaran antar Satker, Unit Eselon I, program, Kegiatan, KRO. Revisi Anggaran

dilaksanakan untuk Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional pegawai sebesar **Rp2.861.106.000,00**.

**Realisasi
Pendapatan
Rp11.120.254,00**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.120.254,00. Rincian estimasi pendapatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	T.A 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Denda	-	7.099.776,00	-
Pendapatan Lain-lain	-	4.020.478,00	-
Jumlah	-	11.120.254,00	-

Pendapatan Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Denda** dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp7.099.776,00, sesuai Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: BAKPP.Perj-04/DPP/PPK/05/2023 tanggal 15 Mei 2023; dan
- b. Pendapatan lain-lain** yang terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp617.871,00 (telah disetor pada tanggal 17 April 2023 dengan NTPN 8FFD10N9VR3B3RK) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.402.607,00 (telah disetor pada tanggal 25 Mei 2023 dengan NTPN F83AA48VV5G3DHDK).

Dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 85,72%, karena tidak ada penjualan lelang aset yang dilaksanakan di tahun 2023.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.120.254,00	77.889.990,00	(85,72)
Jumlah	11.120.254,00	77.889.990,00	(85,72)

**Realisasi Belanja
Negara
Rp31.194.549.229,00**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp31.194.549.229,00 atau 97,03% dari anggaran belanja sebesar Rp32.148.490.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.184.548.000,00	3.167.296.094,00	99,46
Belanja Barang	27.286.195.000,00	26.851.064.836,00	98,41
Belanja Modal	1.677.747.000,00	1.675.725.395,00	99,88
Total Belanja Kotor	32.148.490.000,00	31.694.086.325,00	98,59
Pengembalian Belanja	0	499.537.096,00	
Jumlah Belanja Bersih	32.148.490.000,00	31.194.549.229,00	97,03

Dibandingkan dengan TA 2022, realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 2,34%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.109.746.134,00	3.412.220.307,00	(8,86)
Belanja Barang	26.409.077.700,00	27.355.529.669,00	(3,46)
Belanja Modal	1.675.725.395,00	1.172.624.184,00	42,90
Jumlah	31.194.549.229,00	31.940.374.160,00	(2,34)

Penurunan realisasi belanja Dewan Pertimbangan Presiden di Tahun 2023 ini antara lain karena adanya relokasi dan optimalisasi anggaran yang berdampak pada penurunan anggaran yang menyebabkan penurunan belanja.

Belanja Pegawai
Rp3.109.746.134,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.109.746.134,00 dan Rp3.412.220.307,00. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 8,86% dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.650.362.144,00	2.858.954.307,00	(7,30)
Belanja Lembur	79.926.950,00	68.494.000,00	16,69
Belanja Uang Makan PNS	437.007.000,00	484.772.000,00	(9,85)
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	3.167.296.094,00	3.412.220.307,00	(7,18)
Pengembalian Belanja	57.549.960,00	0	
Jumlah Belanja Pegawai Bersih	3.109.746.134,00	3.412.220.307,00	(8,86)

Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 8,86% dari TA 2022. Hal ini disebabkan dua orang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden baru dilantik pada tanggal 14 Juli 2023 sehingga tidak ada pembayaran gaji pejabat negara dimaksud dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

Belanja Barang
Rp.26.409.077.700,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.409.077.700,00 dan Rp27.355.529.669,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,46% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	14,883,624,884.00	14,978,422,958.00	(0.63)
Belanja Barang Non Operasional	850,683,082.00	1,005,072,470.00	(15.36)
Belanja Persediaan	1,054,912,791.00	1,577,270,031.00	(33.12)
Belanja Jasa	3,648,530,337.00	3,687,771,622.00	(1.06)
Belanja Pemeliharaan	2,451,040,292.00	3,461,350,991.00	(29.19)
Belanja Perjalanan	3,962,273,450.00	2,649,188,796.00	49.57
Jumlah Belanja Kotor	26,851,064,836.00	27,359,076,868.00	(1.86)
Pengembalian Belanja	441,987,136	3,547,199	-
Jumlah Belanja	26,409,077,700.00	27,355,529,669.00	(3.46)

Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,46% dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya relokasi anggaran.

Belanja Modal
Rp1.675.725.395,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.675.725.395,00 dan Rp1.172.624.184,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 42,90% dari Realisasi Belanja Modal TA 2022.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang TA 2023 antara lain dikarenakan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.278.807.395,00	1.172.624.184,00	9,06
Belanja Modal Lainnya	396.918.000,00	0	-
Jumlah Belanja Modal	1.675.725.395,00	1.172.624.184,00	42,90

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1.278.807.395,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.278.807.395,00 dan Rp1.172.624.184,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,06% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang TA 2023 antara lain dikarenakan adanya peningkatan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	645.434.220,00	345.991.200,00	86,55
Alat Bengkel dan Alat Ukur		3.000.000,00	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.067.000,00	778.832.984,00	(35,79)
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	80.910.675,00	44.800.000,00	80,60
Peralatan Olah Raga	3.500.000,00	-	-
Alat Besar	48.895.500,00	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kotor	1.278.807.395,00	1.172.624.184,00	9,06
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bersih	1.278.807.395,00	1.172.624.184,00	9,06

**Belanja Modal
Lainnya**
Rp396.918.000,00

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp396.918.000,00 dan Rp0.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 antara lain dikarenakan adanya penambahan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Aset Tetap Renovasi	396.918.000,00	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya Kotor	396.918.000,00	-	-
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Modal Lainnya Bersih	396.918.000,00	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp699.238.272,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp699.238.272,00 dan Rp903.579.026,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

**Kas di Bendahara
Pengeluaran**
Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp452.500,00 yang Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022**

URAIAN	Kas Per 31 Des 2023	Kas Per 31 Des 2022
Kas Tunai	0	452.500,00
Kas Bank	0	0
Selisih kas	0	0
Jumlah	0	452.500,00

Beban Dibayar di Muka
Rp5.087.226,00

C.1.2 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

Beban dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.087.226,00 dan Rp4.239.233,00.

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Pembayaran Lisensi <i>Zoom Meeting</i>	1.281.919,00	1.199.650,00
Pembayaran Lisensi SSL dan Elementer Pro	3.360.732,00	2.540.000,00
Pembayaran Domain Wantimpres	444.575,00	499.583,00
Jumlah	5.087.226,00	4.239.233,00

Persediaan
Rp694.151.046,00

C.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp694.151.046,00 dan Rp898.887.293,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	683.763.046,00	873.949.568,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	10.388.000,00	24.937.725,00
Jumlah	694.151.046,00	898.887.293,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp3.036.663.501,00

C.2 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Dewan Pertimbangan Presiden berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya.

Saldo aset tetap Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.036.663.501,00 dan Rp2.333.325.329,00.

Peralatan dan Mesin

Rp3.036.663.501,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.325.635.180,00 dan Rp11.050.230.392,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	11.050.230.392,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.278.807.395,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(3.402.607,00)
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	12.325.635.180,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(9.687.789.679,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.637.845.501,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp1.278.807.395,00 berupa:

- a. Pembelian alat kantor dan rumah tangga sebanyak 93 unit, senilai Rp500.067.000,00, dengan rincian sebagai berikut,

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
AC Split	2 unit	31.413.000,00
Kursi Besi/Metal	64 unit	176.712.000,00
Kursi Kayu	2 unit	16.650.000,00
Lemari Kayu	10 unit	117.882.000,00
Meja Kerja Besi/Metal	8 unit	51.060.000,00
Meja Kerja Kayu	7 unit	106.350.000,00

- b. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar berupa Telephone PABX sebanyak 1 unit, senilai Rp80.910.675,00.
- c. Komputer berupa *Firewall* sebanyak 1 unit, senilai Rp645.434.220,00.
- d. Peralatan Olahraga berupa pembelian alat tenis meja sebanyak 1 unit, senilai Rp3.500.000,00.
- e. Alat besar berupa pembelian pompa air sebanyak 1 unit, senilai Rp48.895.500,00.

Mutasi kurang terdiri dari koreksi pencatatan nilai berkurang aset BMN Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai sebesar

Rp3.402.607,00. Koreksi ini dilakukan untuk memperbaiki pencatatan nilai perolehan lemari kayu, meja kerja besi/metal dan meja kerja kayu berdasarkan temuan BPK Tahap III atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 berupa kekurangan volume pada pekerjaan pengadaan furnitur perkantoran Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp3.402.607,00. Hal ini sesuai Berita Acara Koreksi atas pencatatan di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Nomor BA-KOREKSI-01/Set.Wantimpres/Um/PL.07.00/06/2023.

**Aset Tetap
Lainnya
Rp398.818.000,00**

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp398.818.000,00 dan Rp1.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.900.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	396.918.000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	0
Saldo per per 31 Desember 2023	398.818.000,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan (CALK BMN).

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp9.687.789.679,00

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp9.687.789.679,00 dan Rp8.718.805.063,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.325.635.180,00	(9.687.789.679,00)	2.637.845.501,00
	Akumulasi Penyusutan	12.325.635.180,00	(9.687.789.679,00)	2.637.845.501,00

Aset Lainnya
Rp366.656.392,00

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya pada Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Saldo Aset lainnya Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp366.656.392,00 dan Rp74.324.250,00.

Aset Tak Berwujud
Rp858.693.900,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dewan Pertimbangan Presiden berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp858.693.900,00 dan Rp858.693.900,00.

Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud (ATB) pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	858.693.900,00
Mutasi tambah:	0,00
Reklasifikasi masuk	0,00
Mutasi kurang:	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	858.693.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(833.919.150,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	24.774.750,00

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaanya
Rp341.882.182,00*

C.3.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp341.882.182,00 dan Rp0. Dana yang dibatasi penggunaannya dimaksud merupakan realisasi anggaran yang ditampung dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan serta belanja sewa kendaraan operasional yang Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 31 Desember 2023 .

**Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya**
Rp833.919.150,00

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp833.919.150,00 dan Rp784.369.650,00. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	858.693.900,00	833.919.150,00	24.774.750,00
	Akumulasi Penyusutan	858.693.900,00	833.919.150,00	24.774.750,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

**Kewajiban Jangka
Pendek**
Rp347.955.615,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp347.955.615,00 dan Rp7.479.834,00.

**Utang Kepada
Pihak Ketiga**
Rp347.955.615,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp347.955.615,00 dan Rp7.027.334,00.

Adapun Rincian utang kepada pihak ketiga pada lingkup Dewan Pertimbangan Presiden per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

Uraian	Jumlah
Utang Langganan Telepon	1,478,033.00
Utang Langganan TV Kabel	4,595,400.00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	341,882,182.00
Jumlah	347,955,615.00

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 terdiri dari tagihan langganan telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp1.478.033,00,- tagihan langganan TV Kabel bulan Desember 2023 sebesar Rp4.595.400,00,00, dan utang kepada pihak ketiga lainnya atas belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan serta belanja sewa kendaraan operasional yang telah dicatat Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp341.882.182,00.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp452.500,00.

*Ekuitas
Rp3.754.603.090,00*

C.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.754.603.090,00 dan Rp3.303.748.771,00.

Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Rp7.099.776,00

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.099.776,00 dan Rp0.

Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp7.099.776,00, sesuai Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: BAKPP.Perj-04/DPP/PPK/05/2023 tanggal 15 Mei 2023.

Beban Pegawai
Rp3.109.746.134,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.109.746.134,00 dan Rp3.412.220.307,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.592.812.184,00	2.858.954.307,00	(9,31)
Beban Lembur	79.926.950,00	68.494.000,00	16,69
Beban Uang Makan PNS	437.007.000,00	484.772.000,00	(9,85)
Jumlah	3.109.746.134,00	3.412.220.307,00	(8,86)

Beban Persediaan
Rp1.259.649.038,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.259.649.038,00 dan Rp1.386.894.793,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	1.230.205.313,00	1.357.396.368,00	(9,37)
Beban Persediaan bahan baku	-	394.000,00	(100,00)
Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	29.443.725,00	29.104.425,00	1,17
Jumlah Beban Persediaan	1.259.649.038,00	1.386.894.793,00	(9,17)

**Belanja Barang dan
Jasa**
Rp18.939.870.005,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.939.870.005,00 dan Rp19.667.099.821,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan beban barang dan jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran dan penurunan beban penanganan pandemi Covid-19 karena pemerintah telah menetapkan status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berakhir. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2023 dan TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	4.619.981.295,00	4.192.170.845,00	10,20
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	619.000,00	600.150,00	3,14
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169.336.000,00	159.276.000,00	6,32
Beban Barang Operasional Lainnya	9.612.405.872,00	10.445.788.501,00	(7,98)
Beban Bahan	530.833.082,00	347.119.630,00	52,93
Beban Honor Output Kegiatan	184.850.000,00	307.850.000,00	(39,95)
Beban Langganan Telepon	24.107.752,00	48.393.988,00	(50,18)
Beban Sewa	3.171.838.184,00	3.072.748.019,00	3,22
Beban Jasa Profesi	342.986.000,00	357.200.000,00	(3,98)
Beban Barang Non Operasional penanganan Pandemi Covid 19	71.200.000,00	147.600.000,00	(51,76)
Beban Barang Operasional penanganan Pandemi Covid 19	39.268.320,00	171.932.448,00	(77,16)
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	447.000,00	209.322.000,00	(99,79)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	56.800.000,00	207.098.240,00	(72,57)
Beban Peralatan dan Mesin Ekstakomptabel	7.000.000,00	-	-
Beban Jasa Lainnya	108.197.500,00	-	-
Jumlah	18.939.870.005,00	19.667.099.821,00	(3,70)

Beban Pemeliharaan
Rp2.450.219.560,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.450.219.560,00 dan Rp3.529.715.086,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan antara lain karena Dewan Pertimbangan Presiden melakukan penambahan aset *firewall* sehingga tidak perlu dilakukan lagi pemeliharaan untuk tahun 2023 .

Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.292.084.480,00	3.187.222.208,00	(28,09)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.315.012,00	103.114.413,00	50,62
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0,00	70.904.095,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	280.068,00	0,00	-
Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan Lainnya	2.540.000,00	168.474.370,00	(98,49)
Jumlah	2.450.219.560,00	3.529.715.086,00	(30,58)

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.962.273.450,00**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.962.273.450,00 dan Rp2.649.188.796,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden baik dalam negeri maupun luar negeri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.757.202.040,00	2.000.729.537,00	37,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.450.000,00	49.200.000,00	77,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.990.000,00	60.275.000,00	9,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	340.053.483,00	444.034.298,00	(23,42)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	711.577.927,00	94.949.961,00	649,42
Jumlah Belanja	3.962.273.450,00	2.649.188.796,00	49,57

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.018.874.377,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.018.874.377,00 dan Rp756.344.061,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	969.324.877,00	706.766.126,00	37,15
Jumlah Penyusutan	969.324.877,00	706.766.126,00	37,15
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	49.549.500,00	49.549.500,00	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	28.435,00	-
Jumlah Amortisasi	49.549.500,00	49.577.935,00	(0,06)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.018.874.377,00	756.344.061,00	34,71

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp617.871,00

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	77.605.640,00	(100,00)
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	-	77.889.990,00	(100,00)
Beban Penjualan Aset Non Lancar	-	284.350,00	(100,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya	617.871,00	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non operasional Lainnya	617.871,00	-	-
Beban dari Kegiatan Non operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	617.871,00	77.605.640,00	(99,20)

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari pos luar biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp3.303.748.771,00*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.303.748.771,00 dan Rp2.765.121.825,00.

*Defisit LO
Rp30.732.914.917,00*

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp30.732.914.917,00 dan Rp31.323.857.224,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp340.261,00*

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 adalah masing-masing sebesar Rp340.261,00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar Entitas
Rp31.183.428.975,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.183.428.975,00 dan Rp31.862.484.170,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(11.120.254)
Ditagihkan ke Entitas Lain	31.194.549.229
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	31.183.428.975

Ekuitas Akhir
Rp3.754.603.090,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tanggal 31 Desember Tahun 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.754.603.090,00 dan Rp3.303.748.771,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pagu Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

**Rincian Anggaran Belanja
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2023**

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Revisi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	220.500.000,00	39.270.000,00
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-20	158.400.000,00	71.200.000,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	119.220.000,00	27.830.000,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	148.960.000,00	447.000,00
Jumlah		647.080.000,00	138.747.000,00

F.2. Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp138.737.296,00 atau 99,99% dari anggaran belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp138.747.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Realisasi Belanja
Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2023**

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	39.270.000,00	39.268.320,00	100%
Belanja Barang Non-Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	71.200.000,00	71.200.000,00	100%
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	27.830.000,00	27.821.976,00	100%
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	447.000,00	447.000,00	100%
Jumlah	138.747.000,00	138.737.296,00	99,99

Rincian realisasi belanja dalam rangka Covid-19 antara lain:

- a. Realisasi Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 berupa pengadaan vitamin penambah daya tahan tubuh dan vasilitas isolasi bagi pejabat/pegawai dan PTT di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

- b. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 berupa pembayaran paket data dan komunikasi Biro Umum serta Biro Data dan Informasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- c. Realisasi Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 berupa pengadaan masker medis, hand sanitizer dan higien kit untuk pejabat/pegawai dan PTT di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- d. Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Tes PCR maupun Antigen Covid-19 di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

F.3 Penghapusan Akun Covid-19

Berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal , Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Penggunaan Akun Khusus Covid-19 memberitahukan bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan sampai dengan semester I 2023 atau sampai dengan berakhirnya status pandemi COVID-19. Apabila akun COVID-19 masih digunakan dengan alasan tertentu maka dapat dilakukan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penyusunan Laporan Keuangan.

Satker Dewan Pertimbangan Presiden telah menghilangkan penggunaan akun COVID-19 melalui Revisi POK DIPA kedelapan Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 September 2023.

Adapun akun COVID-19 yang masih digunakan pada Semester II yaitu:

- a. Belanja Barang non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 berupa belanja paket data dan komunikasi bagi pejabat dan pegawai Dewan Pertimbangan Presiden bulan Juni dan Juli 2023 (**sebelum surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksut dilayangkan**) sebesar Rp29.000.000,00, dan;
- b. Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pengadaan Masker periode **April sampai dengan Juni 2023** untuk

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden TA 2023 sebesar Rp12.480.000,00.

F.4 Rekening Pemerintah

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921000.

Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2023 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921001.

F.5 Capaian Output

KODE	URAIAN	CAPAIAN OUTPUT	
		Target	Capaian
CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		
5966	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepala Presiden		
BAH	Pelayanan Publik dan Lainnya		
001	Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan	18 (Layanan)	100%
WA	Layanan Dukungan Manajemen		
6443	Pelayanan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		
CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	1 (Layanan)	100%
002	Layanan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 (Layanan)	100%
KODE	URAIAN	CAPAIAN OUTPUT	
		Target	Capaian
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
956	Layanan BMN	1 (Layanan)	100%
959	Layanan Protokol	1 (Layanan)	100%
962	Layanan Umum	1 (Layanan)	100%
994	Layanan Perkantoran	1 (Layanan)	100%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
951	Layanan Sarana Internal	97 (Unit)	100%
971	Layanan Prasarana Internal	2 (Layanan)	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
953	Layanan Permantauan dan Evaluasi	2 (Dokumen)	100%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2 (Dokumen)	100%

F.6 Pengungkapan Lainnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan, dan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Agus Widodo
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan	: Bintang Verawaty
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengelolaan Dana Operasional Menteri	: Toto Suroto
Pejabat Penandatanganan SPM	: Desi Puhati Purnomo Sari

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/ 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- r. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- s. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

- t. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- u. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- w. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- x. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- y. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- z. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Kode Bagian Anggaran 007.07.00.500592.

3. Periode Pelaporan

Periode Pelaporan BMN Tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode Tahun Anggaran (TA) (*Audited*) 2023 adalah 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, antara lain meliputi:

1. Penggolongan/klasifikasi BMN berupa Aset Tetap di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sedangkan atas Barang Persediaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 40/PB/2006 tentang Barang Persediaan;
2. Pelaksanaan kapitalisasi/pengembangan nilai BMN di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan dengan mengacu pada ketentuan bahwa terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan nilai kapitalisasinya Rp25.000.000 ke atas, sedangkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin memiliki nilai kapitalisasi Rp1.000.000 ke atas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Rekonsiliasi dan Konsolidasi data Laporan BMN di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan secara periodik dan berjenjang kepada unit akuntansi atas. Selain itu, rekonsiliasi juga dilakukan antara unit akuntansi barang bersama dengan unit akuntansi keuangan, serta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, guna menjaga keakuratan dan keandalan Laporan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan penyusutan BMN berupa Aset Tetap di Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2017 yang berubah dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode TA 2023 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode TA 2023 (*Audited*) ini adalah sebesar Rp 12.798.908.416 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp11.119.585.628 (sebelas milyar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode TA 2023 (*Audited*) yaitu mutasi tambah sebesar Rp1.682.725.395 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp3.402.607 (tiga juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah). Nilai mutasi tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden TA 2023 (*Audited*) merupakan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPyBDS);
12. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Aplikasi SAKTI pada Kementerian Sekretariat Negara;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan Pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TA 2023 (AUDITED)

1. Saldo Awal Periode TA 2023 (Audited)

Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebesar Rp11.119.585.628 (sebelas milyar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp11.052.130.392 (sebelas milyar lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan nilai ekstrakomptabel sebesar Rp67.455.236 (enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode TA 2023 (Audited)

Mutasi BMN Periode TA 2023 (Audited) adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 sebesar Rp694.151.046 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp898.887.293 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan berkurang sebesar Rp204.736.247 (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	873.949.568	(190.186.522)	683.763.046
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117191	Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga-jaga	24.937.725	(14.549.725)	10.388.000
117199	Persediaan Lainnya	0	-	-
JUMLAH		898.887.293	(204.736.247)	694.151.046

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang.

b. Tanah (131111)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Tanah.

c. Peralatan dan Mesin (132111)

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	1,795 unit dengan nilai sebesar	Rp	12,400,090,416
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	1,684 unit dengan nilai sebesar	Rp	11,117,685,628
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	111 unit dengan nilai sebesar	Rp	1,285,807,395
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	3,402,607

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar per 31 Desember 2023	1 unit dengan nilai sebesar	Rp	48.895.500
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	1 unit dengan nilai sebesar	Rp	48.895.500
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 48.895.500	Rp -
Jumlah Penambahan		Rp 48.895.500	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Alat Besar berupa pembelian Pompa Air sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp48.895.500.
- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Besar.
- Dari jumlah 1 unit Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp 48.895.500
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2023	14 unit dengan nilai sebesar	Rp	471.511.763
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	14 unit dengan nilai sebesar	Rp	471.511.763
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Angkutan.
- Dari jumlah 14 unit Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14 unit	Rp 471.511.763
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel & Ukur per 31 Desember 2023	9 unit dengan nilai sebesar	Rp	28.265.300
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	9 unit dengan nilai sebesar	Rp	28.265.300
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN Periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Bengkel dan Alat Ukur.
- Dari jumlah 9 unit Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9 unit	Rp 28.265.300
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

4) Alat Pertanian (3.04)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Peralatan dan Mesin berupa Alat Pertanian.

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga per 31 Desember 2023	1.357 unit dengan nilai sebesar	Rp	6.134.791.859
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	1.250 unit dengan nilai sebesar	Rp	5.631.127.466
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	107 unit dengan nilai sebesar	Rp	507.067.000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit dengan nilai sebesar	Rp	3.402.607

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 500,067,000	Rp 7,000,000
Jumlah Penambahan		Rp 500,067,000	Rp 7,000,000

Mutasi kurang tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp 3.402.607	Rp -
Jumlah Pengurangan		Rp 3.402.607	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa AC Split sebanyak 2 unit, Kursi Besi/Metal sebanyak 64 unit, Kursi Kayu sebanyak 2 unit, Lemari Kayu sebanyak 10 unit, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 8 unit, Meja Kerja Kayu sebanyak 7 unit dan Jam Elektronik sebanyak 14 unit dengan total nilai sebesar Rp507.067.000.

- ii. Pada Laporan BMN Periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi kurang pada Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang BMN Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai sebesar Rp3.402.607. Koreksi ini dilakukan untuk memperbaiki pencatatan nilai perolehan Lemari Kayu, Meja Kerja Besi/Metal dan Meja Kerja Kayu berdasarkan temuan BPK Tahap III atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 berupa kekurangan volume pada Pekerjaan Pengadaan Furnitur Perkantoran Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp3.402.607.
- iii. Dari jumlah 1.357 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.357 unit	Rp 6.134.791.859
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi per 31 Desember 2023	134 unit	dengan nilai sebesar	Rp 541.599.675
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	133 unit	dengan nilai sebesar	Rp 460.689.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp 80.910.675
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 80.910.675	Rp -
Jumlah Penambahan		Rp 80.910.675	Rp -

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berupa pembelian Telepon PABX sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp80.910.675.
- ii. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
- iii. Dari jumlah 134 unit Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	133 unit	Rp 536.687.075
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	1 unit	Rp 4.912.600

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran per 31 Desember 2023	7 unit	dengan nilai sebesar	Rp 110.990.750
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	7 unit	dengan nilai sebesar	Rp 110.990.750
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- ii. Dari jumlah 7 unit Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7 unit	Rp 110.990.750
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

8) Alat Laboratorium (3.08)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Peralatan dan Mesin berupa Alat Laboratorium.

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan per 31 Desember 2023	6 unit	dengan nilai sebesar	Rp 41.623.635
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	6 unit	dengan nilai sebesar	Rp 41.623.635
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Persenjataan.
- ii. Dari jumlah 6 unit Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6 unit	Rp 41.623.635
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer per 31 Desember 2023	260 unit	dengan nilai sebesar	Rp 4.874.681.934
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	259 unit	dengan nilai sebesar	Rp 4.229.247.714
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp 645.434.220
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 645.434.220	Rp -
Jumlah Penambahan		Rp 645.434.220	Rp -

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Komputer berupa pembelian *Firewall* sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp645.434.220.

- ii. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi kurang pada Komputer.
- iii. Dari jumlah 260 unit Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	260 unit	Rp 4.874.681.934
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

11) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2023	2 unit	dengan nilai sebesar	Rp	138.275.000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	2 unit	dengan nilai sebesar	Rp	138.275.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Keselamatan Kerja.
- ii. Dari jumlah 2 unit Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	Rp 138.275.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

12) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2023	3 unit	dengan nilai sebesar	Rp	3.425.000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	3 unit	dengan nilai sebesar	Rp	3.425.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Peralatan Proses/Produksi.
- ii. Dari jumlah 3 unit Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3 unit	Rp 3.425.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

13) Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu per 31 Desember 2023	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp	2,530,000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp	2,530,000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada Rambu-Rambu.
- Dari jumlah 1 unit Rambu-rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp 2.530.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

14) Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga per 31 Desember 2023	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp	3,500,000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	1 unit	dengan nilai sebesar	Rp	3,500,000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp	-

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 3,500,000	Rp -
Jumlah Penambahan		Rp 3,500,000	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Peralatan Olahraga berupa pembelian Alat Tenis Meja sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp3.500.000.
- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi kurang pada Peralatan Olahraga.
- Dari jumlah 1 unit Peralatan Olahraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp 3,500,000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

No.	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo Per 31 Desember 2023			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Alat Bantu	7	1	48,895,500	3,492,536	45,402,964
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	5	447,581,000	427,138,139	20,442,861
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	9	23,930,763	23,930,763	-
4	Alat Bengkel Bermesin	10	3	19,421,000	10,934,750	8,486,250
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	5	5,844,300	5,844,300	-
6	Alat Ukur	5	1	3,000,000	900,000	2,100,000
7	Alat Kantor	5	297	2,210,332,540	1,769,392,270	440,940,270
8	Alat Rumah Tangga	5	926	3,860,877,083	2,824,695,885	1,036,181,198
9	Alat Studio	5	37	313,835,800	245,695,003	68,140,797
10	Alat Komunikasi	5	34	216,890,875	113,819,332	103,071,543
11	Alat Kedokteran	5	1	1,093,750	1,093,750	-
12	Alat Kesehatan Umum	5	6	109,897,000	67,457,600	42,439,400
13	Persenjataan Non Senjata Api	3	3	5,105,454	5,105,454	-
14	Alat Khusus Kepolisian	4	3	36,518,181	36,518,181	-
15	Komputer Unit	4	132	2,031,390,666	1,734,858,916	296,531,750
16	Peralatan Komputer	4	128	2,843,291,268	2,292,559,467	550,731,801
17	Alat SAR	2	1	1,875,000	1,875,000	-
18	Alat Kerja Penerbagan	10	1	136,400,000	115,940,000	20,460,000
19	Unit Peralatan Proses Produksi	8	3	3,425,000	3,425,000	-
Jumlah (dipindah)			1,596	12,319,605,180	9,684,676,346	2,634,928,834

No.	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo Per 31 Desember 2023			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jumlah (dipindah)			1,596	12,319,605,180	9,684,676,346	2,634,928,834
20	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	1	2,530,000	2,530,000	-
21	Peralatan Olah Raga	3	1	3,500,000	583,333	2,916,667
Jumlah			1,598	12,325,635,180	9,687,789,679	2,637,845,501

d. Gedung dan Bangunan (133111)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Gedung dan Bangunan.

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan (13411)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

f. Aset Tetap Lainnya (135121)

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	5 unit	dengan nilai sebesar	Rp 398,818,000
Terdiri dari Saldo Awal	2 unit	dengan nilai sebesar	Rp 1,900,000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	3 unit	dengan nilai sebesar	Rp 396,918,000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Rincian atas Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan.

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak per 31 Desember 2023	2 unit	dengan nilai sebesar	Rp 1,900,000
terdiri dari Saldo Awal sebanyak	2 unit	dengan nilai sebesar	Rp 1,900,000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (Audited) tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- Dari jumlah 2 unit Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	Rp 1.900.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

3) Aset Tetap Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2023	3 unit	dengan nilai sebesar	Rp 396,918,000
terdiri dari Saldo Awal sebanyak	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	3 unit	dengan nilai sebesar	Rp 396,918,000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 396,918,000	Rp -
Jumlah Penambahan		Rp 396,918,000	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) terdapat mutasi tambah pada Aset Tetap Renovasi berupa Renovasi Gedung dan Bangunan sebanyak 3 unit dengan total nilai sebesar Rp396.918.000.
- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi kurang pada Aset Tetap Renovasi.
- Dari jumlah 3 unit Aset Tetap Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3 unit	Rp 396,918,000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan.

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember	54 unit	dengan nilai sebesar	Rp 858,693,900
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	54 unit	dengan nilai sebesar	Rp 858,693,900
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Rincian mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Software (162151)

Saldo Software per 31 Desember	54 unit	dengan nilai sebesar	Rp 858,693,900
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	54 unit	dengan nilai sebesar	Rp 858,693,900
Mutasi Tambah Per 31 Desember	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2023	- unit	dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada *Software*.

- ii. Dari jumlah 54 unit *Software* di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	54 unit	Rp 858.693.900
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagai tindaklanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

No	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo per 31 Desember 2023			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud		54	858,693,900	833,919,150	24,774,750
Jumlah			54	858,693,900	833,919,150	24,774,750

2) Lisensi (162161)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tetap Lainnya berupa Lisensi.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya (162151)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tak Berwujud Lainnya.

i. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah (16611)

Pada laporan BMN periode TA 2023 (*Audited*) tidak terdapat BMN yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

3. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode TA 2023 (*Audited*)

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Periode TA 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.755.589.297 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya.

Penyajian Nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
I	Aset Lancar			
1	Persediaan	694,151,046	0	694,151,046
	Sub Jumlah (1)	694,151,046	0	694,151,046
II	Aset Tetap			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	12,325,635,180	74,455,236	12,400,090,416
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	396,918,000	0	396,918,000
6	Aset Tetap Lainnya	1,900,000	0	1,900,000
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9,687,789,679)	(59,028,736)	(9,746,818,415)
8	KDP	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	3,036,663,501	15,426,500	3,052,090,001
III	Aset Lainnya			
1	Software	858,693,900	0	858,693,900
2	Lisensi	0	0	0
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
5	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan dalam Operasi	0	0	0
6	Akumulasi Amortisasi Software	(833,919,150)	0	(833,919,150)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
8	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	24,774,750	0	24,774,750
	Total	3,755,589,297	15,426,500	3,771,015,797

Rincian Akumulasi Penyusutan BMN pada UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2023 adalah berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp.	Rp.	Rp.
I	Aset Tetap			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	9,687,789,679	59,028,736	9,746,818,415
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	KDP	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	9,687,789,679	59,028,736	9,746,818,415

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp.	Rp.	Rp.
II	Aset Lainnya			
1	Akumulasi Amortisasi Software	833,919,150	0	833,919,150
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Sub Jumlah (2)		833,919,150	0	833,919,150
Total		10,521,708,829	59,028,736	10,580,737,565

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada UAKPB Sekretariat Negara periode TA 2023 (*Audited*) per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	694,151,046	694,151,046	0
2	Peralatan dan Mesin	12,325,635,180	12,325,635,180	0
3	Aset Tetap dalam Renovasi	396,918,000	396,918,000	0
4	Aset Tetap Lainnya	1,900,000	1,900,000	0
5	Software	858,693,900	858,693,900	0
6	Lisensi	0	0	0
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
8	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0
9	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0
Total		14,277,298,126	14,277,298,126	0

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan Nilai BMN secara gabungan selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Tahunan TA 2019 <i>Audited</i>	Rp 1,662,766,833		
2	Tahunan TA 2020 <i>Audited</i>	Rp 2,222,671,226	Rp 559,904,393	34%
3	Tahunan TA 2021 <i>Audited</i>	Rp 2,771,069,956	Rp 548,398,730	25%
4	Tahunan TA 2022 <i>Audited</i>	Rp 3,306,536,872	Rp 535,466,916	19%
5	Tahunan TA 2023 <i>Audited</i>	Rp 3,755,589,297	Rp 449,052,425	14%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
1	Tanah	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 8,113,423,054	Rp 8,013,872,224
3	Gedung & Bangunan	Rp -	Rp -
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 1,900,000	Rp -
6	Aset Tidak Berwujud	Rp 660,495,900	Rp 198,198,000
Total		Rp 8,775,818,954	Rp 8,212,070,224

b. Informasi Lainnya

Transaksi BMN periode TA 2023 (*Audited*) menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan update terakhir dari Kementerian Keuangan per 23 Januari 2024 dan telah dilakukan penyusutan dan amortisasi pada aplikasi.

Penanggungjawab UAKPB
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Kepala Biro Umum



R.H. Bambang B. Nugroho